



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016 – 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025.
- Mengingat : 1.** Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2.** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016 -
2031

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 15-20 tahun.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Produk Wisata adalah Segala jenis produk baik berbentuk barang ataupun jasa yang merupakan komoditas pariwisata dan semua bentuk pelayanan yang dinikmati wisatawan dari dia berangkat meninggalkan tempat tinggalnya hingga ia kembali pulang.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. (menyesuaikan dengan Permenpar No. 10 Tahun 2016).
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
17. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Budaya adalah pandangan hidup dari masyarakat yang berkaitan dengan akibat-akibat serta nilai dan norma.
21. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan keparwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPD dan KSPD.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah kawasan yang memiliki ruang yang mencakup luasan area tertentu dengan komponen kepariwistaannya serta memiliki tema produk wilayah sebagai potensi yang mencerminkan karakteristik daerah tersebut.
24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
25. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

26. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
27. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan Pariwisata dan strategi pembangunan Pariwisata tahun 2016 - 2025.
- (4) Visi pembangunan Kepariwisata yaitu terwujudnya Daerah sebagai Destinasi Wisata yang unggul dan berbudaya.
- (5) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:
 - a. mengembangkan budaya dan kearifan lokal;
 - b. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis dan bertanggungjawab;
 - c. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan;
 - d. mengembangkan kemitraan Pariwisata; dan
 - e. meningkatkan penyelenggaraan Kelembagaan Kepariwisata Daerah yang profesional dan akuntabel.
- (6) Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. mempertahankan atau meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor pariwisata dengan meningkatkan tata kelola dan pelayanan;

- d. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemangku kepentingan yakni {Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat} dalam rangka terciptanya sinergitas pengelolaan kepariwisataan secara efektif dan berkesinambungan; dan
- e. membentuk lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu mensinergiskan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

(7) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong jumlah kunjungan Wisatawan.
- b. meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan domestik dan mancanegara;
- c. meningkatnya pengeluaran Wisatawan di Destinasi Pariwisata;
- d. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata sesuai kebutuhan di Destinasi Pariwisata; dan
- e. meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat lokal secara khusus dan pendapatan asli Daerah secara umum.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 4

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. DPD ;dan
- b. KSPD.

Pasal 5

DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat, KPP yang diantaranya merupakan KSPD;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring Produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 6

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset Budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan Produk Wisata masa depan.

Pasal 7

- (1) Perwilayahan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas.
- (2) Pembangunan DPD dilakukan dengan memperhatikan jumlah objek Wisata dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap objek Wisata.
- (3) Pembangunan DPD mengikuti RIPPARDA dengan didahului perencanaan pemanfaatan kawasan berupa *masterplan* dan *Detail Engineering Design*.

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPD dibagi menjadi:

- | | |
|----------|--|
| a. KPP 1 | : Kawasan Perkotaan. |
| tema | : Wisata Sejarah, Budaya, dan
Buatan Manusia. |

- meliputi Kecamatan : Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur.
- b. KPP 2 : Kawasan Pesisir dan Kawasan Perbatasan Kabupaten.
- tema : Wisata Bahari, Minat Khusus, Alam/Ekowisata dan Sejarah.
- meliputi Kecamatan : Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk.
- c. KPP 3 : Kawasan Pesisir Kepulauan dan Kawasan Perbatasan Negara
- tema : Wisata Bahari, Minat Khusus, Alam/Ekowisata dan Budaya.
- meliputi Kecamatan : Derawan dan Maratua.
- d. KPP 4 : Kawasan Sedang Berkembang.
- tema : Wisata Minat khusus, Alam/Ekowisata, Sejarah dan Budaya.
- meliputi Kecamatan : Segah dan Kelay.

Pasal 9

Penetapan DPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, sejarah; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, laut dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, laut dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara;
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataaan dan pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam Destinasi Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata merupakan pembangunan yang mendukung perintisan DPD dan KSPD, peningkatan kualitas, daya saing dan pengendalian.
- (2) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;

- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - c. mendorong pencrapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (4) Strategi untuk pengendalian pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif dalam pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata dilaksanakan melalui pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata serta penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 15

Pengembangan investasi di bidang Pariwisata dilakukan dengan pemberian insentif, kemudahan dan promosi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 16

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Pasal 17

Pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 18

Pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 19

Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 20

Pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di dalam dan diluar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 21

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing Produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 22

Penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 23

Peningkatan daya saing Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 24

Peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 25

Peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 26

Peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata dengan menggunakan pola satu pintu.

Pasal 27

Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, lembaga swasta, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 28

Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 29

Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 30

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

Penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai pilar strategis pembangunan di Daerah.

Pasal 32

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 33

Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 34

Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 35

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c untuk mendukung pembangunan Kepariwisata, berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisata dan SDM Pariwisata.

**BAB VII
INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

Pasal 36

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2016 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Dinas selaku instansi teknis didukung oleh instansi terkait di Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 37

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPADA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

- (1) Semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang terkait dengan pembangunan Kepariwisata Daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata di luar Perwilayahan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 26 Januari 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah (Regional Secretary) of Kabupaten Berau. The stamp features a central emblem with a bird and the text "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU" around the perimeter. A signature is written across the stamp, and the name "JONI MARHANSYAH" is printed below it.
JONI MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2031 :
(3/3/2018).

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025

Program Prioritas

Prioritas program pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau untuk lima tahun kedepan adalah peningkatan sarana prasarana pada setiap objek untuk setiap destinasi pariwisata yaitu pembangunan dan pengembangan Wisata bahari, Wisata Alam, Wisata Perkotaan, Wisata Religi, Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Minat Khusus. Peningkatan pemasaran Destinasi Pariwisata dan peningkatan kapasitas Sumber daya manusia pelaku wisata serta pembangunan kelembagaan.

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau

Tabel 30. Arah Pembangunan 1: Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran	Indikator Program	Program	Kegiatan (Action Plan)	Para Pihak (Stakeholders)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Berau	1.Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata. 2.Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan	1.Adanya rencana induk dan rencana detail Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Berau. 2.Diterbitkannya Perda tentang Zona perwilayahan pembangua Pariwisata, tata bangunan dan tata lingkungan pembangunan Pariwisata kabupaten Berau 3.Adanya SK BUpati tentang Penetapan Perwilayahan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Berau	1.Tersusunnya perencanaan kawasan pariwisata 2.Adanya regulasi tentang penetapan kawasan	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 4. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Bappeda, Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Lembaga terkait.

2	Penetapan dan Penegakan regulasi pembangunan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Berau	Monitoring dan melakukan pengawasan oleh pemerintah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata	1. Ditetapkan standar dan pengawasan pembangunan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Berau 2. Terbentuk Tim pengawasan dan evaluasi pembangunan DP dan KSP kab. Berau 3. Adanya kebijakan bersama yang melibatkan dinas kebudayaan dan pariwisata dengan dinas terkait lainnya 4. Adanya laporan monitoring performance unit kerja koordinasi lintas sector	1. Mengintensifkan komunikasi antar sektor 2. Monitoring performance unit kerja koordinasi lintas sector	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 5. Pembuatan Rencana Tapak (Site Plan) Kawasan Wisata	Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan
					2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Perguruan Tinggi dan LSM
3	Pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Berau	Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat sebagai wujud <i>good governance</i>	1. Berdirinya beberapa usaha bidang pariwisata yang baru 2. Adanya pertemuan regular antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat 3. Laporan regular tentang kondisi Indeks Kepuasan Masyarakat dari kinerja bidang pariwisata. 4. Meningkatnya nilai investasi bidang pariwisata	1. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam bidang pariwisata 2. Pembinaan industri kecil untuk menunjang sektor pariwisata	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindagkop, Disnaker, BPPT
					2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 3. Monitoring , evaluasi dan pelaporan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindagkop, Disnaker, BPPT

Table. 31. Arah Pembangunan 2 : Pembangunan Daya Tarik Wisata Kabupaten Berau

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran	Indikator Program	Program	Kegiatan (Action Plan)	Para Pihak (Stakeholders)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Identifikasi potensi atraksi wisata dan perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi Pariwisata Kabupaten Berau	1. Mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada dan merencanakan pengembangan produk dan araksi wisata. 2. Membangun dan mengembangkan daya tarik wisata yang ada dalam rangka pembangunan destinasi pariwisata baru. 3. Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata yang baru.	1. Ditetapkannya objek wisata dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau. 2. Diversifikasi objek wisata dan daya tarik wisata pada setiap Dsetinasi Pariwisata kabupaten Berau 3. Adanya pengelolaan Objek dan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan . 4. Bertambahnya jumlah objek wisata baru yang bisa dikunjungi. 5. Terbitnya master plan fisik dan non fisik bagi objek wisata Baru 6. Terbangunnya sarana dan prasarana bagi objek wisata baru 7. Adanya pengusaha baru bidang pariwisata	1. 1. Mengemibag kan jumlah objek wisata baru 2. Membuat master plan fisik dan non fisik objek wisata baru 3. Membangun sarana dan prasarana pariwisata 4. Mendorong pembangunan usaha pariwisata	1 Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 Pengembangan Kemitraan 1 Pengelolaan Kekayaan Budaya 2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 4. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 1. Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA dan LSM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA dan LSM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Arkeologi, Lembaga Adat (masyarakat) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Arkeologi, Lembaga Adat (masyarakat)
2	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat pasar	1. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong suatu destinasi pariwisata baru. 2. Memperkuat upaya	1 Inovasi produk pada setiap objek wisata di Kabupaten Berau 2 Terwujudnya peningkatan Kualitas produk dalam rangka peningkatan daya tarik wisata yang memperhatikan	1. Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata alam, bahari, dan budaya (daya tarik wisata)	1 Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2 Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 4 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, PU, Diskominfo, Bappeda, PHRI, ASITA

		konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.	kearifan lokal dan konservasi.		2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, PU, Diskominfo, Bappeda, Disnaker, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA, LSU, LSP
				2. Jumlah fasilitasi/pendukung amenities/fasilitas pariwisata	1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker, Perguruan Tinggi, LSU, LSP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, PHRI, ASITA,
3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	1. Meningkatkan kualitas produk wisata yang ada dan mengembangkan diversifikasi produk dan keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema. 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan dalam rangka pelestarian untuk keberlanjutan dan memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.	1. Tersedianya produk wisata baru dan atraksi wisata baru dalam rangka peningkatan daya jual. 2. Adanya peningkatan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik pada setiap destinasi dengan mengutamakan keberlanjutan. 3. Terbentuknya kesamaan persepsi, sikap dan respon antara masyarakat dan wisatawan dalam melestarikan lingkungan dalam rangka keberlanjutan setiap objek wisata pada setiap Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau	1. Perintisan dan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pelatihan Pemandu wisata terpadu.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, PU, BPPT, Diskominfo, Disnaker, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA, LSU, LSP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA, LSU, LSP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker, LSU, LSP

[illegible]

		koservasi potensi kepariwisataan lingkungan.			manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 4. Monitoring , evaluasi dan pelaporan. 1 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata.. 2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. 3 Pelatihan Pemandu wisata terpadu.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA, LSU, LSP
				3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
				4. Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejahtera purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Arkeologi, Perguruan Tinggi
				5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 3. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Arkeologi, Perguruan Tinggi
				6. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan LSM

Table 32. Arah Pembangunan 3 : Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran	Indikator Program	Program	Kegiatan (Action Plan)	Para Pihak (Stakeholders)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan destinasi berupa jalan dan ketersediaan moda transportasi	1. Meningkatkan ketersediaan moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar baik menuju destinasi pariwisata dan di kawasan destinasi pariwisata. 2. Meningkatkan konektivitas atau keterhubungan dari suatu destinasi pariwisata dengan destinasi pariwisata lainnya serta kemudahan mendapatkan akses dari pintu masuk wisata. 3. Penyiapan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di destinasi pariwisata. 4. Membangun system informasi manajemen yang baik untuk mempermudah dalam pemilihan moda transportasi bagi wisatawan dalam menetapkan perencanaan perjalanan wisata dan meningkatkan pelayanan reservasi setiap moda transportasi. 5. Mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	1. Tersedianya berbagai moda transportasi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan menuju dan di objek wisata 2. Terkoneksinya antar destinasi pariwisata 3. Tersedianya sarana dan fasilitas wisata pada setiap destinasi 4. Tersedianya pusat informasi pariwisata tentang pariwisata pada setiap destinasi pariwisata Kabupaten Berau 5. Meningkatnya tingkat keterjangkauan, parasarana simpul pergerakan moda transportasi	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar untuk peningkatan kualitas kepariwisataan 2. Mengintensifkan komunikasi antar sektor 3. Monitoring performance unit kerja kordinasi lintas sektor 4. Pengembangan 5. Prasarana moda angkutan 6. Pengembangan system keamanan moda transportasi 7. Kemudahan melakukan reservasi moda transportasi	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4. Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 2. Monitoring , evaluasi dan pelaporan. 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. 2. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, PU, Dinas Perumahan dan Tata Ruang. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, Disnaker - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Arkeologi

2	Peningkatan mutu sarana - prasarana menuju destinasi pariwisata dan di kawasan destinasi shingga memberikan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan.	1. Meningkatkan dan memberikan jaminan kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan destinasi pariwisata. 2. Keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi atas destinasi pariwisata dengan pintu masuk kawasan wisata yang mendukung kemudahan transfer intermoda transportasi. 3. Menjamin keamanan dan keselamatan moda transportasi bagi wisatawan dalam perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan destinasi pariwisata.	1. Terlayannya wisatawan dengan moda transportasi yang aman dan memadai di kawasan destinasi Pariwisata. 2. Terkoneksinya antar objek wisata pada setiap dan antar destinasi pariwisata dengan moda transportasi yang beragam. 3. Terpenuhinya sarana pengaman pada setiap armada transportasi.	1. Terciptanya ketertiban pergerakan moda transportasi. 2. Terciptanya tingkat keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan. 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Monitoring , evaluasi dan pelaporan. 1. Pelatihan Pemandu wisata terpadu.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, PU, Dinas Perumahan dan Tata Ruang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, EPTT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker
---	---	---	---	--	---	---	--	--

Table 33. Arah Pembangunan 4 : Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran	Indikator Program	Program	Kegiatan (Action Plan)	Para Pihak (Stakeholders)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata pada setiap destinasi pariwisata.	1. Memberikan insentif atau kemudahan untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung penetapan dan pengembangan setiap destinasi pariwisata. 2. Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta. 3. Memfasilitasi, dan	1. Tersedianya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau. 2. Terbangunnya fasilitas Pariwisata kabupaten Berau atas inisiatif swasta. 3. Pemberian insentif Pengembangan pada setiap destinasi Pariwisata.	1. Terimplementasinya pemberian insentif 2. Peningkatan peran pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi pengembangan prasarana umum.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan 4. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 5. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, PU, PHRI, ASITA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, PU, PHRI, ASITA,

		meningkatkan koordinasi dalam pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan setiap Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing.			3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4. Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Analisis pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 2. Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, PU, PHRI, ASITA, LSP, LSU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi
2	Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan pariwisata dan daya saing destinasi pariwisata.	1. Meningkatkan pola kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. 2. Mendukung pola kemandirian bagi swasta dan masyarakat dalam peningkatan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata. 3. Menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.	1. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. 2. Terwujudnya pola kemandirian dalam pengelolaan fasilitas umum oleh swasta dan masyarakat. 3. Tersedianya prasarana wisata bagi yang berkebutuhan khusus.	1. Adanya sistem insentif pengembangan sarana dan fasilitas umum dan pariwisata 2. Meningkatnya daya saing DP dan sekitarnya. 3. Adanya pedoman dan SOP skema kemitraan 4. Diterapkannya skema kemitraan untuk rute udara, darat dan laut.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 5. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 6. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya. 4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 5. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, BAPPEDA, PU, PHRI, ASITA, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, PU, PHRI, ASITA, Lembaga Adat, Badan Arkeologi, LSP, LSU Perguruan Tinggi

					3. Pengelolaan Kekayaan Budaya	pengembangan kemitraan pariwisata. 1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 2. Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi
3	Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi setiap destinasi pariwisata untuk menjaga daya dukung dan daya saing.	1. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan operasional setiap usaha di destinasi pariwisata. 2. Menjalankan penegakan peraturan perundang-undangan pada setiap destinasi pariwisata.	1. Tersusun dan terlaksananya Standard operasional Prosedure (SOP) pengelolaan setiap objek wisata. 2. Adanya regulasi penetapan destinasi dan pengaturan arus wisatawan dari destinasi ke destinasi. 3. Tersedianya jenis skema Kemitraan Jalannya program kemitraan untuk Fasilitas Pariwisata Angkutan Udara, Angkutan Darat dan Angkutan laut.	1. Adanya standar operasional prosedur setiap sarana - prasarana wisata. 2. Terlaksananya pengawasan terhadap sarana - prasarana yang ada	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan 4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 6. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 7. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, PU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, PHRI, ASITA

Table 34. Arah Pembangunan 5: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran	Indikator Program	Program	Kegiatan (Action Plan)	Para Pihak (Stakeholders)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kapasitas diri masyarakat lokal untuk merubah pola pikir dengan meningkatkan pemahaman akan persepsi, sikap dan respon terhadap pembangunan Destinasi Pariwisata.	1. Melakukan pemetaan data potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata. 2. Melakukan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata. 3. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran serta.	1. Terwujudnya kesamaan persepsi, sikap dan respon terhadap fungsi dan manfaat Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau. 2. Kapasitas Sumber daya manusia pada setiap destinasi wisata meningkat. 3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata meningkat. 4. Terbentuknya badan pengelola pada setiap objek dan destinasi pariwisata. 5. Teridentifikasinya seluruh potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal	1. Meningkatkan kekuatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah tingkat lokal 2. Meningkatkan kemampuan sumberdaya lokal 3. Permintaan terhadap produk industri kecil dan menengah meningkat 4. Meningkatnya kesadaran tentang standar wisata	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Pengembangan Dasar Tujuan Wisata 3. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Pengembangan SIM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 4. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 5. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 1. Pengembangan statistic kepaiwisata 2. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 1. Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah 2. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 4. Pemberian dukungan, penghargaan kerjasama dibidang budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, BPPT Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata, Disnaker, BAPPEDA, PHRI, ASITA, LSU, LSP Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata, Disnaker, LSU, LSP

					4. Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 3. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 4. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 5. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejahtera purbakala, museum dan peninggalan bawah air 6. Pengembangan database system informasisejarah purbakala	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat
					5. Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Penyusunan system informasi database bidang kebudayaan 3. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 4. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 5. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 6. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktulisasi budaya local 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat dan LSM
					6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat
					7. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat dan LSM

2	Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata.	1. Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata. 2. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata. 3. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di Destinasi Pariwisata 4. Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang berkembang di masyarakat lokal.	1. Bertambahnya usaha masyarakat lokal dibidang pariwisata (Akomodasi, Transportasi, souvenir, rumah makan dan jasa lainnya). 2. Terbentuknya desa wisata dengan produk unggulannya (<i>One village one product</i>). 3. Peningkatan Kemasan produk industri pendukung wisata. 4. Terakomodirnya kreativitas masyarakat lokal dalam usaha pariwisata. 5. Peningkatan pemberdayaan kekuatan masyarakat dan pemerintah tingkat lokal 6. Bertambahnya buah tangan produksi lokal baik dari kuantitas maupun diversifikasinya. 7. Semakin meningkatnya permintaan produksi lokal 8. Semakin besarnya modal dan total aset pelaku usaha pariwisata lokal.	1. Dioptimalkan ya potensi dan kapasitas masyarakat lokal 2. Merancang desa menjadi desa wisata 3. Merubah bekas tambang menjadi tempat wisata 4. Meningkatkan kemampuan berusaha 5. Meningkatkan peran serta masyarakat	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4. Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 1. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 3. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 4. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 5. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejahtera purbakala, museum dan peninggalan bawah air 6. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 7. Pengembangan nilai dan geografi sejarah 8. Perekaman dan digitalisasi bahanpustaka 9. Perumusan kebijakan sejarah purbakala 10. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 11. Pendukungan pengelolaan museum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT dan Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, LSP, LSU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, Perguruan Tinggi, Badan Arkeologi, Lembaga Adat
---	---	---	---	--	---	--	--

					5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	dan taman budaya di daerah 12. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 13. Pengembangan database system informasi sejarah purbakala 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat
					6. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, LSM dan Swasta
3	Penyusunan regulasi dan pemberian insentif pada masyarakat di kawasan destinasi untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah pada Usaha Pariwisata	1. Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil, menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.	1. Bertambahnya usaha kecil dan menengah masyarakat di bidang industri pariwisata pada setiap Destinasi Pariwisata. 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha kecil dan menengah pada sector pariwisata.	1. Membuat program proteksi terhadap usaha kecil dan menengah 2. Peningkatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam industri pariwisata	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan SIM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 4. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 5. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSP, LSU

					3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Nilai Budaya 5. Pengelolaan Kekayaan Budaya 6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 4. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 1. Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 3. Pemberian dukungan, penghargaan kerjasama dibidang budaya 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan kesejahteraan purbakala, museum dan peninggalan bawah air 3. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 4. Pengembangan nilai dan geografi sejarah 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, Perguruan Tinggi, LSP, LSU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, Lembaga Adat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat,
4	Peningkatan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam meningkatkan usaha di bidang Kepariwisata.	1. Mendorong kemitraan antar usaha dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah. 2. Meningkatkan	1. Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) yaitu terjalin sinergisitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam tatanan usaha kecil dan menengah.	1. Memberikan insentif bagi industri kecil dan menengah	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 3. Pengembangan SIM di bidang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, Lembaga Adat,

		kualitas produk industri kecil, menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.	2. Terstandarisasinya produk industri kecil dan menengah masyarakat di setiap destinasi 3. Kurangnya keluhan tentang kualitas produk wisata dan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan.		kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 4. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 5. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. 7. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 8. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	
				3. Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Pemberian dukungan, penghargaan kerjasama dibidang budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Arkeologi, Lembaga Adat,
				4. Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, LSM
				5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Lembaga Adat,
				6. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3. Merbangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga Adat, Swasta

5	Penyediaan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah Usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal.	1. Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global. 2. Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.	1. Terbentuknya jaringan pasar untuk industri kecil dan menengah bidang pariwisata terhadap pasar global. 2. Terlaksananya konektivitas antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah bidang pariwisata di setiap destinasi. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas produk dan harga bersaing dalam pemasaran hasil industri kecil dan menengah bidang pariwisata. 4. Semakin banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam memasarkan produk wisata	1. Adanya jaringan pemasaran industri kecil dan menengah dengan pasar global. 2. Pelaku industri kecil dan menengah menjadi subjek industri pariwisata.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 4. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata. 5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. 7. Pengembangan statistic kepaiwisataan 8. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA, HPI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI
---	---	--	---	---	---	---	---

6	Penyerahan dukungan permodalan bagi masyarakat dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata.	1. Mendorong pemberian insentif dan kemudahan akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.	1. Adanya kemudahan permodalan antara lembaga perbankar dengan pengusaha kecil dan menengah bidang pariwisata. 2. Pemberian kredit lunak terhadap pengusaha kecil dan menengah bidang pariwisata. 3. Meningkatnya keuntungan usaha kecil dan menengah	1. Industri kecil dan menengah di bidang pariwisata meningkat	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya. 3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 4. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 5. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 2. Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, Disperindagkop, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI
7	Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta perannya dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata di destinasi pariwisata.	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan	1. Kesadaran masyarakat meningkat dalam menjalankan sadar wisata. 2. Meningkatnya kualitas atraksi wisata sebagai wujud sadar wisata. 3. Peran serta masyarakat dalam menjaga iklim kondusif destinasi meningkat.	1. Sapta pesona menjadi gaya hidup masyarakat 2. Peningkatan kelompok sadar wisata pada setiap kelompok masyarakat di destinasi pariwisata.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 2. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, PU, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI

		setempat. 3. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan. 4. Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.			3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, Perguruan Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI
				3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat
				4. Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah 2. Penatagunaan naskah kuno nusantara 3. Pemberian dukungan, penghargaan kerjasama dibidang budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat
				5. Pengelolaan Kekayaan Budaya		
				6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 4. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktulisasi budaya local	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat

					7. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3. Merbangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSM ASITA, PHRI
8	Peningkatan motivasi dan kesadaran untuk mencintai dan melestarikan Budaya Lokal.	1. Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.	1. Terwujudnya Peningkatan dan Pelestarian Budaya lokal di Kabupater Berau sebagai investasi pengetahuan 2. Adanya informasi yang jelas dan tepat tentang pariwisata kabupater Berau kepada Wisatawan. 3. Bertambahnya penghasilan industri kecil dan menengah	1. Peningkatan terhadap penghargaan budaya lokal 2. Kepedulian akan kearifan lokal semakin tinggi	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah 2. Penatagunaan naskah kuno nusantara 3. Penyusunan kebijakan tentang budaya local daerah 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 5. Pemberian dukungan, penghargaan kerjasama dibidang budaya 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 3. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 4. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 5. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejahtera purbakala, museum dan peninggalan bawah air 6. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 7. Pengembangan nilai dan geografi sejour 8. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 9. Perumusan kebijakan sejarah purbakala 10. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 11. program pengelolaan kekayaan budaya 12. Pendukung pengelolaan museum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Badan Arkeologi, Lembaga Adat

					dan taman budaya di daerah 13. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 14. Pengembangan database system informasi sejarah purbakala	
				3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Penyusunan system informasi database bidang kebudayaan 3. Penyelenggara dialog kebudayaan 4. Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah 5. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah 6. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya local 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Badan Arkeologi
				4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitas pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitas pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Badan Arkeologi, LSM dan Swasta

Table 35. Arah Pembangunan 6 : Investasi Di Bidang Pariwisata

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran	Indikator Program	Program	Kegiatan (Action Plan)	Para Pihak (Stakeholders)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memberikan kemudahan / insentif di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Mempermudah mekanisme perizinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan	1. Peningkatan investasi bidang pariwisata baik PMDN maupun PMA. 2. Terwujudnya system perizinan terpadu bagi investasi di bidang pariwisata. 3. Adanya buku mapping investasi pariwisata di	1. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi 2. Pembangunan dan fasilitas Tourism Information Center 3. Menyusun regulasi/aturan main yang mudah dalam bisnis investasi di bidang pariwisata (perijinan usaha, pajak, dll) 4. Menyusun data potensi dan	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 2. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, Bappeda, Perguruan Tinggi,

		perundang-undangan. 2. Memberikan jaminan keamanan dalam berinvestasi untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kabupaten Berau 4. Secara reguler mengikuti pameran investasi nasional dan internasional. 5. Penayangan mapping investasi pariwisata pada media cetak, elektronik maupun internet secara reguler. 6. Adanya road show promosi investasi pariwisata ke negara-negara potensial	peluang investasi dibidang pariwisata (Sistem informasi potensi investasi yang mudah diakses) 5. Pemerintah Kabupaten Berau menyediakan infrastruktur,	2. Pengembangan Kemitraan 3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. 1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Badan Arkeologi, LSM
2	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.	1. Menginformasikan peluang investasi di destinasi pariwisata. 2. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.	1. Terinformasikannya peluang investasi dibidang pariwisata di Kabupaten Berau. 2. Terlaksananya promosi investasi di bidang pariwisata di Kabupaten Berau dalam dan luar negeri. 3. Adanya profil investasi di Kabupaten Berau 4. Adanya promosi Peluang investasi ke Negara potensial. 5. Adanya Tourism Information Center di Tanjung Redeb, Labuhan Cermin, Tanjung Batu, Derawan, Maratua dan Biduk-Biduk 6. Adanya regulasi/aturan investasi pariwisata 7. Adanya sistem informasi	1. Penyediaan informasi profil investasi di Kabupaten Berau 2. Mengikuti pameran di tingkat nasional maupun internasional 3. Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet 4. Road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 4. Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata. 5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSU, LSP, Lembaga Adat

						6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. 7. Pengembangan statistik kepariwisataan 8. Pelatihan Pemandu wisata terpadu	
2	Meningkatkan citra pariwisata.	1. Menjaga dan meningkatkan citra Kabupaten Berau yang aman, tertib dan menyenangkan dan berdaya saing dengan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. 2. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengelolaan destinasi pariwisata. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan di setiap destinasi pariwisata Kabupaten Berau. 4. Meningkatkan posisi citra pariwisata Kabupaten Berau. 5. Menetapkan Branding dan Positioning pariwisata Kabupaten Berau.	1. Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke setiap objek wisata. 2. Terlaksananya pengelolaan destinasi yang aman dan berdaya saing. 3. Terwujudnya pelayanan wisata yang berdasarkan sapta pesona oleh pelaku wisata di setiap destinasi pariwisata. 4. Ditetapkannya positioning Pariwisata Kabupaten Berau di tingkat nasional dan dunia. 5. Adanya branding pariwisata Kabupaten Berau.	1. Dikenalnya Fariwisata Kabupaten Berau dengan brandingnya. 2. Ditetapkannya Fariwisata Kabupaten Berau alam positioning pariwisata nasional dan internasional.	1. Pengembaragan Destinasi Pariwisata 2. Pengembaragan Kemitraan 3. Pengembaragan Pemasaran Pariwisata	1. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 4. Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata. 5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. 7. Pengembangan statistik kepariwisataan 8. Pelatihan Pemandu wisata terpadu	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, BPPT, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Badan Arkeologi, LSP, LSU

3	Melakukan kemitraan pemasaran pariwisata.	1. Memberikan keleluasan promosi dan pemasaran pariwisata bagi perseorangan dan kelompok untuk mengembangkan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. 2. Membangun kerjasama pemasaran dan promosi pariwisata Kabupaten Berau antara pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. Mensinergikan pemasaran dan promosi antara pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 4. Membangun kerjasama pemasaran dan promosi antar pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi lain di Indonesia. 5. Membuka peluang kerjasama Internasional dengan Negara lain dalam pemasaran dan promosi pariwisata Kabupaten Berau.	1. Berdirinya beberapa usaha bidang pariwisata yang baru 2. Pemasaran pariwisata dilaksanakan perseorangan, kelompok dan pemerintah. 3. Adanya pertemuan reguler antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat 4. Terlaksananya Pemasaran pariwisata dilakukan secara sinergi antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pusat. 5. Terciptanya pemasaran pariwisata dengan daerah dan Negara lain sebagai destinasi dan sumber pasar wisatawan terbesar	1. Pengembangan koordinasi pemasaran antar wilayah 2. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi 3. Mengembangkan persaingan yang sehat dan berorientasi pasar	1. Pengembangan Kemitraan 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya. 4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSM, Swasta
4	Melakukan promosi pariwisata.	1. Meningkatkan keikutsertaan promosi pariwisata Kabupaten Berau di dalam dan luar negeri. 2. Membuka jejaring promosi wisata dengan kabupaten/kota dan provinsi lain dalam negeri untuk memperkenalkan	1. Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten Berau di dalam dan luar negeri. 2. Terbangunnya system Pemasaran dengan menggunakan informasi teknologi. 3. Adanya jaringan pemasaran dengan badan	1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema	4. Pengembangan Destinasi Pariwisata 5. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan 2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Badan

		potensi destinasi yang dimiliki. 3. Membangun kerjasama promosi dengan badan Promosi Pariwisata Daerah di seluruh Indonesia dan Badan Pariwisata Indonesia di Luar Negeri. 4. Melakukan promosi melalui jejaring sosial dan teknologi informasi (IT) 5. Memperkuat keberadaan promosi dalam dan luar negeri.	/ lembaga promosi wisata dalam maupun luar negeri. 4. Rancangan sistem pemasaran terpadu untuk setiap destinasi. 5. Melaksanakan event khusus di setiap destinasi pariwisata. 6. Adanya kerjasama antar usaha pariwisata khususnya penetrasi standar kualitas jasa 7. Semakin cepat dan akuratnya informasi tentang produk wisata	2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus. 3. Pengembangan bahan promosi secara tematik	6. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 4. Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata. 5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. 7. Pengembangan statistic kepaiwistaan 8. Pelatihan Pemandu wisata terpadu.	Arkeologi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSU, LSP
--	--	--	--	---	---	---	--

Table 37. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Berau

No	Kebijakan	Strategi	Sasaran	Indikator Program	Program	Kegiatan (Action Plan)	Para Pihak (Stakeholders)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan struktur industri pariwisata.	1. Meningkatkan sinergis dan keadilan distributive antar mata rantai pembentuk pariwisata. 2. Memperkuat fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya	1. Adanya industri pariwisata Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau. 2. Adanya regulasi pengaturan industri pariwisata. 3. Terjalannya jaringan kerjasama antar pelaku industri pariwisata yaitu usaha mikro, kecil, menengah dan besar.	1. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan objek wisata dgr pola kemitraan 2. Pendataan dan inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi

		saing. 3. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sector terkait.				3. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 4. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 5. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. 7. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 8. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.	
					3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 2. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata. 3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. 4. Pelatihan Pemandu wisata terpadu.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSU, LSP
2	Peningkatan daya saing produk pariwisata.	1. Meningkatkan daya saing dan kualitas Daya Tarik Pariwisata. 2. Meningkatkan daya saing dan Fasilitas Pariwisata yang berstandar internasional. 3. Meningkatkan daya saing aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata sesuai standar yang	1. Kualitas objek dan daya tarik wisata yang baik pada setiap Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau 2. Tersedianya fasilitas pariwisata yang memadai. 3. pelaku wisata di setiap destinasi wisata memiliki sertifikasi sesuai profesinya.	1. Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar objek wisata 2. Bertambah luasnya akses pasar industri kecil	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA

		di tetapkan. 4. Menjaga citra daya tarik wisata dan destinasi pariwisata. 5. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi profesi bagi sumber daya manusia sertifikasi usaha bagi usaha pariwisata. 6. Meningkatkan kualitas produk (Kemasan dan Kualitas). 7. Meningkatkan pengelolaan destinasi dan kualitas pelayanan.	4. Produk wisata yang dipasarkan memenuhi standar Nasional dan internasional. 5. Pelayanan oleh pelaku wisata mengutamakan kepuasan wisatawan dengan memperhatikan keberlanjutan.		2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 3. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 4. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 5. Pelaksanaan koordinasi pembanguan kemitraan pariwisata. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. 7. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 8. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA
					3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 4. Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata. 5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA, LSU, LSP

						pengembangan pemasaran pariwisata. 7. Pengembangan statistik kepariwisataan 8. Pelatihan Pemandu wisata terpadu.	
					4. Program Pengelolaan kekayaan Budaya	1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 3. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Lembaga Adat
3	Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata.	1. Meningkatkan sinergisitas kerjasama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, dunia usaha dan masyarakat. 2. Mengimplementasi kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, dunia usaha dan masyarakat. 3. Membuka kerjasama internasional dalam industri pariwisata. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah	1. Terfasilitasinya kerjasama usaha kepariwisataan di Kabupaten Berau 2. Intensitas komunikasi antar stakeholder lebih sering. 3. Adanya kerjasama internasional tentang kepariwisataan dengan Negara yang mengembangkan kepariwisataan. 4. Adanya evaluasi kerjasama antara pusat dan daerah.	1. Peningkatan kerjasama dengan daerah lain dalam usaha meningkat daya saing produk obyek wisata 2. Meningkatkan akses jejaring industri	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 3. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 4. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya. 5. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. 7. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 8. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA

		Kabupaten Berau, dunia usaha dan masyarakat serta dunia internasional.			3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	pengembangan kemitraan pariwisata. 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi
4	Penciptaan kredibilitas bisnis.	1. Menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. 2. Menerapkan system yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik. 3. Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.	1. Tersertifikasinya usaha pariwisata 2. Terbangunnya system transaksi bisnis pariwisata yang aman sesuai perundang-undangan. 3. Adanya regulasi pengaturan usaha pariwisata. 4. Tersedianya perencanaan kebutuhan tenaga SDM Pariwisata. 5. Tersedianya proyeksi kebutuhan tenaga SDM Pariwisata. 6. Tersedianya kebutuhan level dan karakter tenaga SDM Pariwisata.	1. Pemetaan Proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan 2. Pengembangan Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata 3. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata di kawasan	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan 4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 6. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 7. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA

						5. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 6. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	
					3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI
5	Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.	1. Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata. 2. Mendorong setiap usaha pariwisata memiliki konsep peduli lingkungan dengan memenuhi standar usaha yang memiliki dokumen lingkungan. 3. Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. 4. Memperhatikan	1. Setiap usaha pariwisata harus berwawasan lingkungan. 2. Setiap usaha pariwisata wajib memiliki dokumen lingkungan. 3. Setiap usaha pariwisata harus memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. 4. Pemanfaatan dan pengusahaan produk lokal. 5. Terjaganya pengembangan dan pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan yang ditandai dengan terjaganya konservasi alam.	1. Meningkatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Objek Wisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 1. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. 3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, PU, BPPT, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, LSP, LSU

		kearifan lokal.			3. Program Pengembangan Nilai Budaya	4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 1. Pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah 2. Penatagunaan naskah kuno nusantara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Badan Arkeologi
					4. Pengelolaan Kekayaan Budaya	3. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 5. Pemberian dukungan, penghargaan kerjasama dibidang budaya 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 3. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya local daerah 4. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya local daerah 5. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan kesejahteraan purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, Badan Arkeologi Lembaga Adat

Table 38. Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Berau

No	Kebijakan	Strategi	Sasaran	Indikator Program	Program	Kegiatan (Action Plan)	Para Pihak (Stakeholders)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan organisasi kepariwisataan.	1. Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung visi dan misi Kepariwisata Kabupaten Berau. 2. Memperkuat tata kelola kepariwisataan Kabupaten Berau. 3. Memperkuat kemampuan perencanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Berau. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Berau. 5. Memfasilitasi pembentukan badan, lembaga pariwisata dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung industri pariwisata Kabupaten Berau. 6. Memperkuat kemitraan antara pelaku wisata di Kabupaten Berau (Asita, PHRI, Organda, HPI, dan lembaga pariwisata lainnya). 7. Menjadikan pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten Berau. 8. Memperkuat kapasitas kelembagaan setiap	1. Ditetapkan Pariwisata sebagai visi Kabupaten Berau. 2. Terbentuknya forum tata kelola pariwisata 3. Terjalannya koordinasi pemerintah dengan Asosiasi kepariwisataan (PHRI, ASITA, HPI, FTKP (DMO), BPPD). 4. Terasilinasinya pembentukan Badan, lembaga, organisasi kepariwisataan. 5. Terasilinasinya badan pengelola objek wisata. 6. Bertambahnya dana CSR yang dipergunakan untuk pengembangan Destinasi Pariwisata dengan melibatkan masyarakat lokal 7. Meningkatnya Kapasitas SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang berdaya saing	1. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata (pokdarwis) 2. Program technical assistance (outsourcing SDM) 3. Program magang 4. Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi dan mohev)	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 3. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 4. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 5. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. 7. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 8. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA

		Organisasi Kepariwisata baik dalam pengelolaan destinasi, pemasaran dan pola kerjasama.					
2	Pembangunan SDM pariwisata.	1. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai. 3. Meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisata. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan dengan melibatkan sebagai assessor dan auditor. 5. Peningkatan sumber daya manusia pelaku wisata yang bersertifikasi kompetensi meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata.	1. Pengikutsertaan PNS dalam pelatihan dan pendidikan kepariwisataan. 2. Tersedianya PNS pada dinas pariwisata yang berdisiplin ilmu pariwisata. 3. Terlatih dan tersertifikasinya para pelaku pariwisata sesuai dengan profesionalismenya.	1. Tersedianya sumber daya manusia internal Dinas kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata. 2. Peningkatan profesionalisme PNS yang makintinggi.	1. Pengembangan Kemitraan 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya. 3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 1. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, LSP, LSU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, LSM
3	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.	1. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pariwisata yaitu penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dan pengembangan aksesibilitas, amenitas di destinasi pariwisata dan	1. Adanya dokumen kajian ilmiah setiap objek wisata pada setiap destinasi pariwisata. 2. Adanya dokumen kajian produk dan kemasan dalam rangka peningkatan pemasaran.	1. Diketahuinya sumber daya yang ada pada setiap objek wisata 2. Diketahuinya peluang pengembangan untuk setiap objek wisata.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi, PHRI, ASITA

		peran serta masyarakat. 2. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran yaitu pengembangan produk, citra pariwisata, kemitraan pemasaran dan pasar baru dalam dan luar negeri. 3. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata yaitu penguatan industri pariwisata, kemitraan, daya saing produk, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab lingkungan. 4. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.	3. Terlaksananya pengkajian pengembangan industri pariwisata. 4. Terlaksananya kajian kelembagaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.		2. Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 2. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. 3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Perguruan Tinggi
					3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					4. Pengembangan Nilai Budaya	1. Pemberian dukungan, penghargaan kerjasama di bidang budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Lembaga Adat
					5. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, LSM



 BUPATI BERAU,

 MUHARRAM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2025

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Berau merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Sumber-sumber potensi Kepariwisata baik yang berupa Objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan budaya, alam, karakteristik kehidupan masyarakat, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air, dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Untuk mencapai hasil pembangunan dibidang kepariwisataan, yang optimal diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata Daerah perlu tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan.

Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Daerah. Untuk itu perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Berau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah" adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata daerah dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas

produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Daya Tarik Wisata" adalah usaha terencana yang disusun secara sistematis untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan wisata dengan daya tarik wisata yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, sehingga keberadaannya lebih diminati wisatawan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "Pemberdayaan masyarakat" adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah" adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen pemasaran pariwisata daerah dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah" adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen kelembagaan pariwisata daerah dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 8